

## **DAMPAK PEMBANGUNAN RUAS TOL CIPULARANG "PENDEKATAN SISTEM SEBAGAI SEBUAH TAWARAN SOLUSI"**

OLEH:

SYURDIANA RADIANSYAH<sup>1</sup>, NANDANG MULYANA<sup>2</sup>, HETTY KRISNANI<sup>3</sup>

1. Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat
2. Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
3. Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

Email:

[mulyananandang@yahoo.com](mailto:mulyananandang@yahoo.com); [hettykrisnani@yahoo.com](mailto:hettykrisnani@yahoo.com))

### **Abstrak**

*Pemerintahan tanah air kita Indonesia, dimulai dari Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Hingga pemerintahan yang sekarang Joko Widodo sedang berfokus mengejar ketertinggalan pembangunan terutama pembangunan di bidang infrastruktur. Salah satu pembangunan yang bisa dianggap berhasil yaitu pembangunan Jalan bebas Hambatan ( TOL ) Cipularang yang menghubungkan dua ibukota provinsi yaitu Jakarta & Bandung. Pembangunan ruas TOL tersebut telah berdampak positif baik pada singkatnya waktu tempuh dan geliat ekonomi di kedua tempat. Tetapi ada yang tertinggal, dimana daerah yang dilewati oleh pembangunan jalan TOL sekarang seolah menjadi " kota mati " baik secara ekonomi maupun sosial ini adalah dampak pembangunan yang terdistorsi. Model pendekatan sistem yang dicetuskan oleh Pincus & Minahan bisa menjadi tawaran solusi guna mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.*

***Kata Kunci : Pembangunan yang terdistorsi Masalah sosial, Pendekatan Sistem***

### **1. Pendahuluan**

Negara yang sejahtera tentunya merupakan tujuan dari semua Negara yang ada didunia. Untuk mewujudkan Negara yang sejahtera tentunya harus meningkatkan pembangunan dalam berbagai sector. Kondisi ini yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintahan Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara di tingkat regional ASEAN. dimulai dari indeks pembangunan manusia, dalam hal ini peningkatan ekonomi maka pemerintah

Indonesia gencar melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Dua tahun kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam APBNP 2016 belanja untuk kementerian/lembaga tercatat Rp 1.306,7 triliun, sedangkan untuk pemerataan daerah, tranfer ke daerah dan desa hanya Rp 776,3

triliun dan dipotong hanya menjadi sekitar Rp 500 triliun.<sup>11</sup>

Pada era pemerintahan sebelumnya dibangun jalan TOL yang menghubungkan antara dua ibu kota provinsi dan Negara yaitu Bandung dan Jakarta. Jalan tol yang dibangun saat ini lebih kita kenal sekarang yaitu ruas jalan TOL Purwakarta-Bandung-Cileunyi (purbaleunyi). Jalan TOL purbaleunyi sepanjang hampir 123 KM merupakan jalan TOL yang membuat jarak antara Jakarta dan Bandung menjadi lebih dekat. Jalan TOL yang dioperasikan oleh cabang purbaleunyi ini pada awalnya mengoperasikan jalan TOL ruas padalarang ruas Padalarang-Cileunyi sepanjang 58,5 KM sejak tahun 1991. Pada tahun 2005, dengan dioprasionalkannya proyek jalan TOL cipularang sepanjang 64.4 KM maka lengkaplah jalan TOL Purbaleunyi menjadi salahsatu ruas terpanjang yang menghubungkan kota Bandung dan Jakarta melalui jalan TOL Jakarta –Cikampek.<sup>12</sup>

Proporsi kendaraan dari jalan arteri Cikampek –Padalarang yang memiliki kemungkinan berpeluang beralih tersebut dibedakan menjadi 3 golongan sesuai pembagian moda pada jalan TOL yang dilakukan oleh PT Jasa marga.dengan membandingkan biaya perjalanan yang dapat dihemat pemakai jalan arteri Cikampek-Padalarang bila menggunakan jalan TOL Cipularang.<sup>13</sup>

Pada ruasTOL Purwakarta-Padalarang yang terdiri atas ruas jalan Purwakarta-Cisomang dan Cisomang – Padalarang proporsi kendaraan golongan 1 yang memiliki kemungkinan beralih menggunakan jalan TOL

cipularang sebesar 86 %, golongan 2A sebesar 64% dan golongan 2B sebesar 49 %.<sup>14</sup>

Perpindahan kendaraan yang digolongkan oleh PT. Jasa Marga sebelumnya berdampak pada volume kendaraan yang berkurang pada ruas jalan nasional yang sebelumnya digunakanhal ini juga terjadi pada ruas jalan yang melewati Kecamatan Cikalongwetan. Ruas jalan yang melewati Kecamatan Cikalongwetan menjadi berkurang karena para pengendara lebih menyukai lewat jalan tol Purbaleunyi untuk pergi ke Jakarta. Kondisi ini dikarenakan jarak tempuh yang relative lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan jalan lama. Ini tentunya akan berdampak pada perekonomian serta kehidupan sosial yang ada dikecamatan tersebut. Sebelum dibangunnya ruas TOL Cipularang, di Kecamatan Cikalongwetan banyak sentra usaha kecil mikro yang menjual makanan serta oleh-oleh khas daerah yang berjualan di sepanjang jalan nasional. Kini seiring dengan telah berfungsinya jalan TOL Purbaleunyi dan berkurangnya volume kendaraan yang melewati jalur tersebut , banyak usaha kecil mikro yang tidak bisa bertahan adan cenderung gulung tikar.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi, pembangunan infrastruktur dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi

<sup>11</sup>“ Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur” <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/10/23/fitra-uang-rakyat-habis-untuk-birokrasi-dan-infrastruktur-382935> diakses pada tanggal 07 November 2016 pukul 10:15 WIB

<sup>12</sup>“Purwakata Bandung Cileunyi” <http://www.jasamarga.com/id /layanan-jalan-TOL/purbaleunyi.html>. diakses pada tanggal 08 November 2016 pukul 09:27 WIB

<sup>13</sup> “Pengaruh pembangunan jalan TOL Cipularang terhadap kinerja jalan arteri Cikampek-Padalarang”[http://www.sappk.itb.ac.id/siwk/index.php?option=com\\_content&task=view&id=197&Itemid=181](http://www.sappk.itb.ac.id/siwk/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=181) diakses pada tanggal 08 November 2016 pukul 09:45 WIB

<sup>14</sup> ibid

dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 2. Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (*internal factors*) maupun faktor lingkungan (*eksternal factors*). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi secara bervariasi, artinya ada yang terjadi secara lambat (*evolution*), namun ada yang terjadi secara cepat (*revolution*). Perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat, apalagi tidak direncanakan dengan baik (*unplanned*), biasanya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, namun biasanya ada sekelompok individu yang tidak mampu melakukannya, sehingga berada dalam kesulitan (*private troubles*) dan masalah (*private problems*).

Kementrian sosial Republik Indonesia mengklasifikasikan masalah sosial yang berkembang pada saat ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu :

Masalah sosial konvensional (*persistent social problems*) atau disebut juga masalah sosial tradisional. Jenis masalah ini pada dasarnya senantiasa ada sejak zaman dahulu. Keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial konvensional, diantaranya :

- a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan.

Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marjinal.

- a. Wanita rawan sosial ekonomi.
- b. Keluarga berumah tidak layak huni
- c. Keterlantaran, meliputi : Balita terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar
- d. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT),
- e. Kecacatan.
- f. Ketunaan Sosial
- g. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.

Masalah sosial kontemporer disebut juga masalah sosial baru, merupakan untuk masalah sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan atau kebijakan politik dewasa ini serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial kontemporer diantaranya

- a. korban tindak kekerasan/perlakuan salah,
- b. anak jalanan,
- c. keluarga yang bermasalah sosial psikologis,
- d. korban Penyalahgunaan Narkoba,
- e. psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) HIV/AIDS
- f. dan pemukiman tidak layak huni.

Saat ini masyarakat sebagai pelaksana usaha kesejahteraan sosial cenderung mengalami penurunan kepedulian. Hal ini ditandai dengan ragam kehidupan sosial masyarakat yang penuh kerentanan,

ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi, yang berdampak tingginya beban ekonomi masyarakat, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, dan menurunnya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.<sup>15</sup>

Dari data penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tahun 2009 kita dapat melihat bahwa masalah sosial terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya oleh pembangunan infrastruktur. Dampak pembangunan infrastruktur contohnya pembangunan ruas TOL Purbaleunyi

yang melewati sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Cicalongwetan telah berdampak terhadap bermunculannya permasalahan sosial baik itu permasalahan yang bersifat konvensional maupun kontemporer.

Masalah yang terjadi merupakan dari pembangunan yang terdistorsi, yaitu pembangunan yang tidak diiringi dengan pembangunan sosial., masalahnya bukan pada pembangunan ekonomi tetapi lebih pada kegagalan dalam mengharmonisasikan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga kegagalan dalam memastikan bahwa keuntungan dari kemajuan ekonomi ini juga dapat menyentuh masyarakat keseluruhan.<sup>16</sup>

Pembangunan yang terdistorsi ini juga berupa degradasi lingkungan, khususnya pada masyarakat dimana usaha-usaha pembangunan ditandai dengan eksploitasi sumber-sumber daya alam.kekayaan yang diambil dari sumber-sumber sebenarnya dapat dipertanggung jawabkan tetapi seringkali tidak membawa keuntungan bagi penduduk local

juga masyarakat luaslebih buruk lagi hancurnya sumber-sumber alam ini berakibat pada kerusakan permanen pada lingkungan yang membahayakan kehidupan generasi masa depan.<sup>17</sup>

Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak positif dan negatif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi begitupun dengan pembangunan ruas TOL Purbaleunyi. Sisi positifnya adalah percepatan ekonomi serta akses dari satu kota ke kota lain mungkin akan semakin cepat, tetapi dampak negatifnya juga terasa diantaranya daerah yang dulunya menjadi jalur utama nasional akan mati dengan sendirinya, masyarakat direlokasi karena tanah dan bangunan mereka terkena jalur pembangunan, daerah pertanian dan perkebunan sebagai ladang & mata pencaharian hilang, usaha kecil mikro yang sebelumnya menjamur di sepanjang jalan nasional yang melewati Kecamatan Cicalongwetan mati dan itu merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Cicalongwetan hingga saat sekarang.

Permasalahan sosial haruslah ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial. Agar berhasilnya pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang tepat. Sebuah perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang tepat memerlukan data-data yang cepat, tepat dan dapat dipercaya.

### 3. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis. Penggunaan deskriptif analitis ini ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada serta menganalisisnya. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan pustaka. Dokumentasi

<sup>15</sup> "Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2009" <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2009-1> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 11:19 wib

<sup>16</sup> James Midgley, *Pembangunan sosial*, perguruan tinggi agama islam DEPAG RI, 2005, hlm. 5

<sup>17</sup> ibid

lebih diarahkan untuk menggunakan hasil laporan serta dokumen yang ada. Sementara pustaka dengan menggunakan konsep atau teori yang sudah ada dan teruji kebenarannya.

#### 4. Model Intervensi berdasarkan Pendekatan Sistem

Dalam tahun 1973, Allen Pincus dan Minahan menulis *Social Work Practice: Model dan Methode*, yang merupakan perintis utama dalam penerapan analisis sistem pada praktek pekerjaan sosial. Asumsi dasarnya adalah, bahwa terdapat *common core* (inti pokok) mengenai keahlian dan konsep yang begitu esensial dalam praktek pekerjaan sosial, yaitu melihat fakta berdasarkan interpretasi teoritis dari teori sistem.

Pincus dan Minahan menyatakan bahwa terdapat empat sistem dasar dalam praktek pekerjaan sosial : sistem pelaksana perubahan (*a change agent system*), sistem klien (*a client system*), sistem sasaran (*a target system*) dan sistem kegiatan (*an action system*). Sistem pelaksana perubahan (*the change agent system*) adalah sekumpulan profesional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana. Juga yang merupakan bagian dari sistem pelaksana perubahan adalah adanya organisasi yang mempekerjakan agen perubahan tersebut. (Pincus and Minahan), 1973, p.54).

Istilah organisasi pelaksana adalah penting sebagaimana pandangan Pincus dan Minahan sepadan dengan penghargaannya (dibayar sesuai kemampuannya) secara perorangan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan dengan demikian, adalah seorang profesional yang secara khusus dipekerjakan dalam rangka perubahan berencana.

Sistem Klien (*The Client System*) adalah sejumlah orang yang sepakat atau meminta pelayanan kepada agen perubahan,

dan yang bekerja berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan agen perubahan (Pincus dan Minahan, 1973, p. 56). Klien dengan demikian dipergunakan dengan penuh kesadaran daripada yang sering diperlakukan oleh pekerja sosial, menghindari kemungkinan dari “melakukan sesuatu” terhadap orang atau organisasi tanpa sepenghahuan atau kesepakatan mereka.

Sistem sasaran (*The Target System*) adalah sekumpulan orang, badan-badan, dan atau organisasi praktek yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu dalam upaya mencapai tujuan melalui agen perubahan (Pincus and Minahan, 1973, p. 59). Misalkan, melalui penganalisaan perubahan sistem sasaran dapat terukur efektivitasnya dan memberikan suatu mekanisme pertanggungjawaban.

Batasan sistem terakhir adalah sistem kegiatan (*The Action System*). Istilah ini dipakai untuk menggambarkan dengan siapa saja pekerja sosial bekerja dalam upayanya memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan perubahan yang diharapkan (Pincus dan Minahan, 1973. p. 61). Salah satunya mungkin akan melibatkan sejumlah sistem kegiatan dengan aspek yang berbeda dari upaya perubahan terencana untuk melengkapi keseluruhan rencana perubahan dari pelaksana (agen) perubahan. Konsep dari metode dan tujuan hasil juga dipergunakan untuk lebih jauh lagi membedakan bagaimana sistem kegiatan dan sistem sasaran dikembangkan dan didayagunakan.<sup>18</sup>

#### 5. Peran Pekerja Sosial

Dengan pembangunan jalan TOL, kemudian mengakibatkan berkurangnya volume kendaraan sehingga matinya ekonomi kerakyatan yang ada dikecamatan Cicalongwetan tidak lantas masyarakat menjadi “ mati tidak berdaya”, tetapi dengan pemberdayaan yang didampingi pekerja sosial

<sup>18</sup> “Pendekatan Sistem dalam Praktik Pekerja Sosial”  
<http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan->

[sistem-dalam-praktik-pekerjaan-sosial/](http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan-) diakses pada tanggal 05 Januari 2017 Pukul 09:39 WIB

harus mampu menghadirkan berbagai macam solusi yang baik untuk kedepannya.

Seperti apa yang di bahas pada paragraf sebelumnya keempat pendekatan sistem bisa menjadi sebuah tawaran solusi dari pekerja sosial bagi masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak yang terjadi dari pembangunan ruas TOL yang menghubungkan dua Ibu kota Provinsi di Jawa ini. pertama dengan pendekatan pelaksana perubahan. Pekerja sosial bisa menjadi pelaksana perubahan itu sendiri. Selain itu pekerja sosial bisa bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat ( LSM ) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. karena dengan pemberdayaan lah masyarakat yang terdampak bisa berfungsi secara sosial kembali.

Kedua adalah sistem klien. yang menjadi klien disini tentunya adalah masyarakat yang terdampak itu sendiri terutama yang ada di wilayah Kecamatan Cicalongwetan. keran masyarakat yang ada di wilayah ini cenderung tidak bisa bertahan terhadap dampak pembangunan jalan TOL , dibandingkan dengan UKM lain yang ada di Kabupaten Purwakarta yang bernasib sama.

Yang Ketiga adalah sistem sasaran. Ada dua sasaran yang patut pekerja sosial sambangi, yang pertama adalah warga yang memiliki UKM di Kecamatan Cicalongwetan. dengan warga pekerja sosial harus mampu membangun komunikasi serta mencari akar permasalahan semisal dengan mengadakan *Focus Group Discussion* ( FGD ). Selanjutnya dengan Pihak Pemerintah, disini adalah Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. dalam pengembangan dan promosi daerah wisata terutama untuk daerah Cicalongwetan patut dipertanyakan. karena bila melihat Kabupaten Purwakarta dengan masalah yang sama cenderung bisa bertahan.

Dan yang terakhir adalah sistem kegiatan, sistem kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perubahan tentunya harus didorong oleh semua pihak yang kompeten. dalam meningkatkan kemampuan masyarakat yang

UKMnya “Mati” pekerja sosial bisa mengadakan kerjasama dan audiensi dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM guna “menghidupkan” kembali geliat ekonomi yang dulu pernah Berjaya. Ini mungkin beberapa solusi dari perspektif pendekatan sistem dalam meningkatkan keberfungsian sosial warga yang terdampak pembangunan ruas TOL Jakarta –Bandung.

### Daftar Pustaka

- Fahrudin, Adi (2014) *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama. Bandung
- Midgley, James (2005) *Pembangunan Sosial.*, Perguruan Tinggi Agama Islam DEPAG RI, Jakarta
- Payne, Malcom (2016) *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, Samudra Biru, Bantul.
- Santoso, Joko (2015) *Corporate Social Responsibility : Upaya Menjalin Kemitraan Korporasi Pemerintah dan Masyarakat*, Tanah Air Beta, Bantul
- Soeharto, Edi (2010) *CSR & Comdev*, Alfabeta, Bandung
- (2009) *Pekerjaan sosial di dunia industri*, Alfabeta, Bandung

### Website

- “Purwakarta Bandung Cileunyi”  
<http://www.jasamarga.com/id /layanan-jalan-TOL/purbaleunyi.html>. diakses pada tanggal 08 November 2016 pukul 09:27 WIB
- “Pengaruh pembangunan jalan TOL Cipularang terhadap kinerja jalan arteri Cikampek-Padalarang” [http://www.sappk.itb.ac.id/siwk/index.php?option=com\\_content&task=view&id=197&Itemid=181](http://www.sappk.itb.ac.id/siwk/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=181) diakses diakses

Jurnal Penelitian & PPM	ISSN: 2442-448X	Vol 4, No: 2	Hal: 129 - 389	Juli 2017
-------------------------	-----------------	--------------	----------------	-----------

pada tanggal 08 November 2016 pukul 09:45 WIB

“Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur” <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/10/23/fitra-uang-rakyat-habis-untuk-birokrasi-dan-infrastruktur-382935>

“Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun

2009” <http://www.kemosos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2009-1> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 11:19 wib

Raharjo, ST. “Pendekatan Sistem dalam Praktik Pekerja Sosial” <http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan-sistem-dalam-praktik-pekerjaan-sosial/> diakses pada tanggal 05 Januari 2017 Pukul 09:39 WIB